

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2018 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga target kinerja yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun.

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan berdurasi 1 (satu) tahun Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana proses penyusunannya melalui mekanisme *bottom up* dan *top down*. Proses *bottom up* dilaksanakan melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan tingkat Kabupaten (Musrenbangkab). Sedangkan mekanisme *top down* dilaksanakan melalui mekanisme Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang merupakan perencanaan dari sisi Pemerintah Daerah. Sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah mengedepankan kesepakatan bersama dari elemen

masyarakat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 di tingkat Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2018.

Rencana Kerja Tahun Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2018 ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Inspektorat.

Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran – sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 54).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2018 ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang.

Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2018 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2018 ini diharapkan akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Proses perencanaan membutuhkan kontinuitas untuk menjaga konsistensi pembangunan yang muaranya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penjabaran serta tindak lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2018, maka disusunlah Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2018. Dalam Rencana Kerja Tahun 2018 ini juga terdapat informasi-informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi

kinerja yang pada akhirnya dapat dilakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Proses perencanaan membutuhkan kontinuitas untuk menjaga konsistensi pembangunan yang muaranya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penjabaran serta tindak lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2018, maka disusunlah Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2018.

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pemalang. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2018 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen, dan tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2016 dan Capaian Renstra Inspektorat

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016 dan perkiraan pencapaian tahun 2017, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan pada Inspektorat berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pemalang

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para *stakeholders* yang terkait langsung dengan pelayanan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan daerah yang terkait dengan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BABIV PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2016 dan Capaian Renstra Inspektorat

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai reuiu hasil evaluasi pelaksanaan RenjaInspektorat Tahun 2016 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2017, serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra Inspektorat sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya.

Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan, bahkan terdapat program/kegiatan yang pencapaian kinerjanya melebihi target rencana, yaitu pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dalam Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif. Tahun Anggaran 2016 Inspektorat dengan anggaran sebesar Rp. 4.409.646.500,00 untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 3.982.521.620,00 dan capaian 90,31%. Pelaksanaan kegiatan dengan mengutamakan prinsip efektif dan efisien namun semua program/kegiatan dilaksanakan secara maksimal.

Untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2017 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatann akan sesuai dengan rencana.Perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2017 belum bisa dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Inspektorat , dikarenakan Rencana kerja 2017 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016 dan capaian Renstra Inspektoratsebagaimana pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2017

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/ Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017	
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi i Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
5 2 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan								
5 2 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase meningkatnya surat-surat dinas yang terkirim dengan baik	1500	930	1.000	860	86.00	1500	11.060	7.38
5 2 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan	12	12	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bln	12 bln	100



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/ Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017				
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi i Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
5	2	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase meningkatnya kelancaran administrasi kantor	41	41	41 unit	41	100	41	100	
5	2	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Prosentase meningkatnya kelancaran kegiatan operasional pengawasan	27	27	27	27	100,00	27	100	
5	2	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Prosentase meningkatnya pelaksanaan administrasi keuangan yang baik dan benar	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	3 jenis	100	
5	2	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase meningkatnya kebersihan gedung kantor	12 bln/2 pkt	12 bln/1 pkt	12 bln/1 pkt	12 bln/1 pkt	100,00	12 bln/2 pkt	12 bln/4	100
5	2	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi kantor	1 pkt/120	1 pkt/120	1 pkt/120	1 pkt/120	100,00	1 pkt/120	3 /360	100
5	2	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi kantor	2 pkt/50.000	2/50.000	2/50.000	2/50.000	100,00	2/50.000	6/150000	100/3
5	2	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase meningkatnya instalasi listrik penerangan yang berfungsi dengan baik	1 pkt	1 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	3 paket	3.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/ Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017				
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi i Target Renstra (%)			
											6	7	8=(7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
5	2	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase meningkatnya persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	32	0	0	0	2 unit	34	17,00
5	2	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase meningkatnya pemahaman aparat pengawasan terhadap kriteria pengawasan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	100	100
5	2	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase meningkatnya kinerja pegawai	240/1625	150/500	200/650	200/650	100	240/1625	590/2775	2,45/1,71
5	2	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prosentase meningkatnya kerjasama dan kemitraan antar instansi pengawas	140	192	280	280	100	140	612	4.37
5	2												
5	2	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan								
5	2	02	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang tercukupi	4	1	4	4	100,00	4	9	2,25



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/ Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017	
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi i Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 2 02 10	Pengadaan mebeleur	Prosentase meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang tercukupi	0	14	-	-	100,00	0	14	14
5 2 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase meningkatnya kenyamanan kerja	1	2	1	1	100,00	1	1	100
5 2 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Prosentase meningkatnya kendaraan dinas/operasional yang berfungsi dengan baik	27	27	27	27	100,00	27	27	100
5 2										
5 2 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan lima tahunan								
5 2 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (TAPKIN)	Prosentase terselesainya LKJIP dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 kali	1	1	1	100,00	1	3	0.6
5 2 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prosentase meningkatnya kemampuan SKPD dalam penyusunan laporan keuangan dengan baik dan benar	1 kali	1	1	1	100,00	1	3	300



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017				
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi i Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
5	2	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Prosentase terselesainya laporan keuangan semesteran SKPD	2 kali	-	1 kali	1 kali	100,00	2	5	250
5	2												
5	2	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan								
5	2	09	02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase terselesainya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	2 kali	-	2 kali	2 kali	100,00	2	4	200
5	2												
5	2	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							-	-
5	2	20	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Prosentase meningkatnya kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan peraturan berlaku	224	224	224 obrik	224 obrik	100,00	224 obrik	224	100



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017				
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi i Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
5	2	20	02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Prosentase meningkatnya pengaduan masyarakat yang tertangani	95	27	45	27	0,6	95	149	1.57
5	2	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase meningkatnya kemampuan SKPD untuk menyusun laporan keuangan yang baik dan benar	8 kali	5	5	5	100,00	8 kali	18	2.25
5	2	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Prosentase meningkatnya pemahaman SKPD terhadap rekomendasi hasil pengawasan sehingga dapat segera menindaklanjuti	224	224	224	224	100,00	224	224	100
5	2	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Prosentase meningkatnya hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	5	5	5	5	100	5	5	100
5	2	20	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Prosentase meningkatnya hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	1	1	1 kali	1 kali	100,00	1	100	100
5	2												
5	2	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan								



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/ Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017				
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi i Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
5	2	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Prosentase meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	30	28	15	15	100	30	70	2.33
5	2												
5	2	22		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Prosentase terwujudnya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan								
5	2	22	01	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Prosentase meningkatnya koordinasi antar APFP sehingga tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan	1	1	1	1	100,00	1	1	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang

Inspektorat Kabupaten Pemalang telah menyusun indikator kinerja mandiri berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat dan standar pelayanan Inspektorat yang berkaitan dengan Tupoksi. Indikator kinerja tersebut digunakan untuk menganalisis kinerja pelayanan di Inspektorat. Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang, bahwa Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pembinaan dan Pengawasan yang meliputi:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	PROYEKSI																	
			TAHUN									TAHUN								
			2014			2015			2016			2017			2018			2019		
			T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C
Sasaran Strategis 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																				
1	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP/LHE /R	224	224	100	224	224	100	224	224	100	224	224	100	224	224	100	224	224	100
2	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran strategis 2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan																				
3	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	-	-	-	1	1	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100	3	3	100
4	Implementasi Penyelenggaraan SPIP	Level	-	-	-	1	1	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100	3	3	100
Sasaran strategis 3. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan																				
5	Jumlah Dokumen Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Dokumen	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pemalang.

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu

- a. Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan berkala dan materi temuan yang sama setiap tahunnya.
- b. Ruang lingkup dan peran pengawasan yang semakin luas. Ruang lingkup pengawasan tidak hanya terbatas pada pemeriksaan reguler tetapi juga meliputi kegiatan reviu RKA, Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi laporan akuntabilitas pemerintah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu serta kegiatan pengawasan lainnya. Kondisi ini mengakibatkan tugas pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal.
- c. Masih kurangnya jumlah Auditor yang dimiliki oleh Inspektorat yaitu sebanyak 14 orang dan P2UPD sebanyak 13 orang, hal ini disebabkan kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat. Kondisi ini akan mempengaruhi target kinerja pengawasan secara tepat waktu.
- d. Kualitas Auditor Inspektorat Daerah yang rata-rata masih ada pada level 1 (Initial) dan 2 (Insfrastructure) seharusnya Auditor di Inspektorat Daerah sudah berada pada level 3 (Integrated).
- e. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih belum memenuhi Standart Pemeriksaan yang efektif.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan internal yang belum optimal;
2. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah;
3. Peningkatan SDM di bidang Pengawasan yang lebih berkualitas dan profesional.

4. Meningkatkan kualitas pemeriksaan.
5. Mewujudkan Inspektorat sebagai Consulting Partner.
6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan.

Pelaksanaan dengan mengetahui isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Menurut rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2018, bahwa Tahun 2018 merupakan tahun ke 2 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah tahun 2018 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan pada **“Peningkatan daya saing daerah, Pelayanan Publik dan Partisipasi Pembangunan menuju Pemalang Berdaulat”**. Guna mencapai tujuan pembangunan daerah tahun 2018 tersebut dengan memperhatikan permasalahan dasar yang dihadapi Kabupaten Pemalang hingga saat ini, maka pembangunan difokuskan pada:

1. Peningkatan daya saing daerah melalui sektor unggulan, yang didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip good governance;
2. Pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur;
3. Peningkatan pelayanan publik, kemudahan layanan baik perijinan maupun non perijinan yang mendorong peningkatan investasi dan daya saing Kabupaten Pemalang;
4. Optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui keterbukaan informasi publik dan optimalisasi teknologi informasi

Untuk mencapai fokus yang ke-1 dan ke-2 yaitu peningkatan daya saing daerah daerah melalui sektor unggulan, yang didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip good governance dan pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya

aparatur maka Inspektorat berupaya melaksanakan program/kegiatan diantaranya dengan memfokuskan pada aspek peningkatan sistem internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, peningkatan aparatur, penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, dan mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

Didalam setiap penyusunan rencana kerja, Inspektorat Kabupaten Pemalang selalu melakukan analisis kebutuhan guna mengakomodasi semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara hasil kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan tingkat kinerja yang telah dicapai. Di dalam Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.4 dibawah ini :

TABEL 2.4

REVIU RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2017 INSPEKTORAT KAB PEMALANG (2017-2018)

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INSPEKTORAT				5.868.500.000	6.597.000.000					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				443.500.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				443.500.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang terkirim	1000 surat	11.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat dinas yang terkirim	1000 surat	12.100.000	
2	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		Jumlah biaya tagihan telepon,air,listrik dan internet	12 bulan	132.000.000	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik		Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 bulan	145.200.000	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	2.500.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	2.500.000	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan roda empat dan dua yang terpelihara	8.19 unit	45.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan roda empat dan dua yang terpelihara	8.19 unit	45.000.000	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah Kebutuhan administrasi keuangan terpenuhi	3 jenis	3.500.000	penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah Kebutuhan administrasi keuangan terpenuhi	3 jenis	3.500.000	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah PTT yg dibayar dan belanja peralatan bahan pembersih	12 bulan/1 paket	15.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah PTT yg dibayar dan belanja peralatan bahan pembersih	12 bulan/1 paket	15.000.000	
7	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah atk yang tersedia dan jumlah pengisian tinta	1 paket/100	45.000.000	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah atk yang tersedia dan jumlah pengisian tinta	1 paket/100	45.000.000	



8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	11 jenis, 38.000 lbr	25.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	11 jenis, 38.000 lbr	25.000.000
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	12 bulan	10.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	12 bulan	10.000.000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah pembelian koran	12 bulan	17.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah pembelian koran	12 bulan	17.500.000
11	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah pembelian gula teh air minum dan snack	12 bulan	25.000.000	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah pembelian gula teh air minum dan snack	12 bulan	25.000.000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun	140 kali	100.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun	140 kali	100.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.932.500.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.032.500.000
13	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah gedung yang dibangun	1 unit	200.000.000	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah gedung yang dibangun		200.000.000
14	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor		Jumlah scanner dan intercom	2 unit scanner dan intercom	50.000.000	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor		Jumlah scanner dan intercom	2 unit scanner dan intercom	55.000.000



15	Pengadaan komputer dan perlengkapannya		Jumlah pembelian komputer,printer,dotmatrik/laser, Flasdisk,mouse	10,4,5,20,4 unit	180.000.000	Pengadaan komputer dan perlengkapannya		Jumlah pembelian komputer,printer,dotmatrik/laser, Flasdisk,mouse	10,4,5,20,4 unit	180.000.000	
16	Pengadaan lemari besi dan filling cabinet		Jumlah filling kabinet	10 filling kabinet	25.000.000	Pengadaan lemari besi dan filling kabinet		Jumlah filling kabinet	10 filling kabinet	27.500.000	
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Gedung yang memerlukan dan pemeliharaan	12 bulan	100.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Gedung yang memerlukan dan pemeliharaan	12 bulan	100.000.000	
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kendaraan dinas/ops roda empat dan dua yang dipelihara selama 12 bulan	12 bulan	75.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kendaraan dinas/ops roda empat dan dua yang dipelihara selama 12 bulan	12 bulan	75.000.000	
19	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	25 unit	75.000.000	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	25 unit	75.000.000	
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	5 unit	25.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	5 unit	25.000.000	
21	Peralatan rutin /berkala mebelair		Jumlah mebeleur	10 unit	7.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		Jumlah mebeleur	10 unit	7.500.000	
22	Pemeliharaan rutin /berkala komputer dan perlengkapannya		Jumlah komputer dan perlengkapannya yang diperbaiki	40 kali	20.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya		Jumlah komputer dan perlengkapannya yang diperbaiki	40 kali	20.000.000	



	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan				22.500.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				75.000.000
23	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/TAPKIN		Jumlah kegiatan LKJIP yang terlaksana	1 kali	10.000.000	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi		Jumlah kegiatan LKJIP yang terlaksana	1 kali	75.000.000
24	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		Jumlah kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran	1 kali	5.000.000			Jumlah kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran	1 kali	
25	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 kali	7.500.000			Jumlah kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 kali	
	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD				15.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan				66.000.000
26	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD		Jumlah kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	2 kali	15.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)		Penyusunan LKJIP	1 kegiatan	18.000.000
						Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		Laporan keuangan semesteran	1 laporan	15.000.000
						Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Laporan akhir tahun	1 laporan	18.000.000
						Penyusunan pelaporan keuangan triwulan		Laporan triwulan realisasi anggaran dan kinerja keuangan	1 dokumen	15.000.000



	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				3.260.000.000	Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD				105.000.000	
27	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala		Jumlah satuan kerja yang di audit	192	2.200.000.000	Penyusunan Data base perencanaan SKPD		Laporan data base perencanaan	1 dokumen	25.000.000	
28	Penanganan Kasus di lingkungan Pemerintah Daerah		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dalam 1 tahun	45	175.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD		Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD (Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA)	6 dokumen	80.000.000	
29	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH		Terselesainya Laporan Reviu Keuangan, Reviu LKJIP dan Evaluasi SAKIP	3 kegiatan	190.000.000						
30	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		Jumlah satker yang dimonitor tindak lanjut temuan pengawasan	192	575.000.000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				3.530.000.000	
31	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif		Terselenggaranya rapat koordinasi pengawasan dalam 1 tahun	5 kali	75.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala		Jumlah satuan kerja yang di audit	192	2.200.000.000	
32	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan		Jumlah Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah	1 kali	45.000.000	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dalam 1 tahun	45	175.000.000	
						Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Terselesainya Laporan Reviu Keuangan, Reviu LKJIP dan Evaluasi SAKIP	3 kegiatan	410.000.000	
						Tindak lanjut hasil temuan pengawasan		Jumlah Satker yang dimonitor tindak lanjut temuan pengawasan	192		



						Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif		Terselenggaranya rapat koordinasi pengawasan dalam 1 tahun	1 kali	75.000.000	
						Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan		Jumlah Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah	1 kali	45.000.000	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				145.000.000	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				295.000.000	
						Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Jumlah Penilaian Angka Kredit	27 orang	145.000.000	
33	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Jumlah Penilaian Angka Kredit yang di laksanakan dan jumlah pegawai yg terlatih dlm bid.Pengawasan sebanyak 56 orang	15 kali	145.000.000	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja		Pegawai inspektorat yang mengikuti teknik pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	56 orang	150.000.000	
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				50.000.000	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				50.000.000	
34	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan		Jadwal dan Jumlah obrik yang menjadi obyek pemeriksaan selama 1 tahun	1 kegiatan	50.000.000	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Jadwal dan Jumlah obrik yang menjadi obyek pemeriksaan selama 1 tahun	1 dokumen	50.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Pemalang tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Pemalang belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stake holders.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat adalah INPRES 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat akan mendukung keberhasilan INPRES 5 Tahun 2004 tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa maka Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Pemalang telah berupaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya semaksimal mungkin. Perkembangan situasi nasional yang dipacu oleh revolusi transformasi global menuntut Inspektorat Kabupaten Pemalang untuk melakukan revitalisasi fungsi dan tugas pokok sehingga dapat beroperasi secara lebih efektif, efisien dan ekonomis serta memiliki akuntabilitas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Sasaran Inspektorat sebagai berikut :

Tujuan Inspektorat Kabupaten Pemalang :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik;
3. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengawasan;
4. Meningkatkan Profesionalisme APIP;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat Kabupaten Pemalang menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup :

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah;
- 2) Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan terwujudnya system pengendalian intern pemerintah;
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- 4) Terwujudnya system pengendalian intern Pemerintah;
- 5) Terlaksananya pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah di Perangkat Daerah dan Desa;
- 6) Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- 7) Meningkatnya kepatuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 8) Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 9) Terpenuhinya jumlah tenaga pemeriksa/SDM pengawasan yang bersertifikat Auditor/P2UPD;
- 10) Terkirimnya APIP mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesi;

- 11) Meningkatnya level kapabilitas APIP;
- 12) Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;
- 13) Terpeliharanya system informasi pengawasan (SIMWAS) berbasis teknologi informasi.

Untuk Rencana Kerja Tahun 2018 ini belum dapat dilakukan evaluasi progress pencapaian tujuan dan sasaran dikarenakan realisasi pencapaian kinerja pada tahun rencana pertama masih sedang berlangsung (2017). Berikut tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2018.

Tabel 3.1				
Tujuan dan Sasaran Tahun 2018				
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2018
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah RKA dan Renja OPD yang direviu	34%
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Evaluasi SAKIP	C
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara baik	100%
3	Meningkatkan kualitas manajemen pengawasan	Terlaksananya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di perangkat daerah dan desa	Prosentase obyek pemeriksaan selama 1 tahun dibandingkan total obyek pemeriksaan (audit universe)	42%

			Prosentase obyek pemeriksaan yang memperoleh hasil evaluasi lebih baik	80%
		Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Jumlah LHP yang tersusun	224
		Meningkatnya kepatuhan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan	Prosentase jumlah obrik yang dipantau tindak lanjut hasil pemeriksaanya	100%
		Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Dokumen PKPT yang berbasis resiko dan selaras dengan Inspektorat Provinsi	1
4	Meningkatnya Profesionalisme APIP	Terpenuhinya jumlah tenaga pemeriksa/SDM pengawasan yang bersertifikat Auditor/P2UPD	Jumlah tenaga pemeriksa/SDM pengawasan yang bersertifikat Auditor dan P2UPD	0,7%
		Terkirimnya APIP mengikuti pendidikan, Pelatihan dan pengembangan profesi	Prosentase APIP yang memiliki sertifikat pengembangan profesi	100%
		Meningkatnya level kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pemalang	Level 2
5	Meningkatnya sarana dan prasarana pengawasan	Pelayanan Administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	100%
		Terpeliharanya system informasi manajemen pengawasan (SIMWAS)	Berfungsinya simwas online sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi	42%

		berbasis teknologi dan pemantauan informasi	tindaklanjut hasil pemeriksaan	
--	--	---	--------------------------------	--

3.3 Program dan Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2018 menetapkan 8 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 41 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, yang terdiri atas kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa surat-menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - g. Penyediaan alat tulis kantor;
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - l. Penyediaan makanan dan minuman;
 - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang terdiri atas kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan gedung kantor
 - b. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - c. Pengadaan komputer dan perlengkapannya.
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan

- j. perlengkapannya Pemeliharaan rutin berkala tempat parkir dan area publik kantor
 - k. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi
 4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - d. Penyusunan pelaporan keuangan triwulan
 5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 - b. Penyusunan data base perencanaan SKPD
 6. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)
 - b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/ khusus)
 - c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (reviu laporan keuangan)
 - d. Inventarisasi Temuan Pengawasan;
 - e. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (rapat koordinasi pengawasan); Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
 - f. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif.
 - g. Evaluasi berkala Temuan Hasil Pengawasan.
 7. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
 - b. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas

8. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
 - a. Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (Penyusunan PKPT tahun berikutnya)

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta Besaran perkiraan kebutuhan anggarannya berikut tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2018 dan Prakiraan maju 2019.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Pemalang
Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Nama SKPD : Inspektorat

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	6	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	Kab.Pemalang	100%	460.350.000				506.385.000
4	6	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase meningkatnya surat dinas yang terkirim	Kab. Pemalang	100%	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			12.100.000
4	6	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah biaya tagihan telepon,air,tagihan listrik dan internet	Kab. Pemalang	100%	132.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			145.200.000
4	6	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor	Kab. Pemalang	100%	2.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			3.025.000
4	6	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang terpelihara	Kab. Pemalang	100%	49.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			54.450.000
4	6	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan yang tercukupi	Kab. Pemalang	100%	3.850.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			4.235.000
4	6	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah PTT yang dibayar dan belanja peralatan bahan pembersih	Kab. Pemalang	100%	16.500.000	Dana Alokasi Umum			18.150.000



4	6	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia dan jumlah pengisian tinta	Kab. Pemalang	100%	49.500.000	(DAU)			54.450.000
4	6	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kab. Pemalang	100%	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			30.250.000
4	6	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	Kab. Pemalang	100%	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			12.100.000
4	6	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembelian koran	Kab. Pemalang	100%	19.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			21.175.000
4	6	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pembelian gula teh air minum dan snack	Kab. Pemalang	100%	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			30.250.000
4	6	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun	Kab. Pemalang	100%	110.0000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			121.000.000
4	6	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	Kab.Pemalang	100%	2.032.500.000				970.750.000
4	6	2	3	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	Kab. Pemalang	100%	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			220.000.000
4	6	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah scanner dan intercom	Kab. Pemalang	100%	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			55.000.000
4	6	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah pembelian komputer, printer, dotmatrik/laser, flasdisk, Mouse	Kab. Pemalang	100%	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			155.000.000



4	6	2	14	Pengadaan lemari besi dan filling kabinet	Jumlah filling kabinet	Kab.Pemalang	100%	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			27.500.000
4	6	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung yang memerlukan pemeliharaan selama 1 tahun	Kab. Pemalang	100%	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			55.000.000
4	6	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 2 yang dipelihara selama 12 bulan	Kab. Pemalang	100%	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			60.000.000
4	6	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Kab. Pemalang	100%	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			28.000.000
4	6	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Kab. Pemalang	100%	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			7.700.000
4	6	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	Kab.Pemalang		6.000.000				6.500.000
4	6	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang diperbaiki	Kab. Pemalang	100%	26.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			26.500.000
4	6	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	Kab.Pemalang	100%	15.000.000				16.500.000
4	6	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah kegiatan LKJIP yang terlaksana	Kab. Pemalang	100%	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			5.500.000
4	6	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran	Kab. Pemalang	100%	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			5.500.000
4	6	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kab. Pemalang	100%	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			5.500.000



4	6	9		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	Kab.Pemalang	100%	6.900.000				7.200.000
4	6	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Kab. Pemalang	100%	6.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			7.200.000
4	6	15		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Kab.Pemalang	100%	3.934.157.600				4.333.500.000
4	6	15	1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah satuan kerja yang di audit	Kab. Pemalang	100%	2.420.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			2.550.000.000
4	6	15	2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dalam 1 tahun	Kab. Pemalang	100%	190.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			192.500.000
4	6	15	3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Twerselesainya Laporan Reviu Keuangan, Reviu LKJIP dan Evaluasi SAKIP	Kab. Pemalang	100%	425.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			450.000.000
4	6	15	5	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Satker yang diinventarisasi temuan pengawasan	Kab. Pemalang	100%	404.157.600	Dana Alokasi Umum (DAU)			450.500.000
4	6	15	6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah Satker yang dimonitor tindak lanjut temuan pengawasan	Kab. Pemalang	100%	560.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			562.500.000
4	6	15	7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terselenggaranya rapat koordinasi pengawasan dalam 1 tahun	Kab. Pemalang	100%	60.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			65.500.000
4	6	15	8	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah	Kab. Pemalang	100%	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			36.000.000



4	6	16		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Kab.Pemalang	100%	159.500.000				160.000.000
4	6	16	1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Penilaian Angka Kredit yang dilaksanakan dan Jumlah Pegawai yang terlatih dalam bidang pengawasan sebanyak 56 orang	Kab. Pemalang	100%	159.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			160.000.000
4	6	17		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Dokumen Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Kab.Pemalang	100%	50.000.000				55.000.000
4	6	17	1	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jadwal dan Jumlah obrik yang menjadi obyek pemeriksaan selama 1 tahun	Kab. Pemalang	100%	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			55.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya untuk mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan pengawasan daerah sebagai wujud tanggung jawab nyata dari pemerintah untuk menciptakan *Good Governance* dan sebagai sarana pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 serta peningkatan kinerja Inspektorat.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2018 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan. Rencana Kerja Tahun 2018 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2018 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Pemalang, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2018. Adapun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu, dukungan maupun *Political Will* dari Pemerintahan Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang . Tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan dibidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 27 Mei 2017

**INSPEKTUR
KABUPATEN PEMALANG**



Drs. M. AGUNG PUNTODEWO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002